IPOSS
INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

POLICY BRIEF

Mengaktifkan Kembali Bursa Fisik CPO Indonesia: Langkah Strategis Menuju Referensi Harga Global





Policy Brief

Mengaktifkan Kembali Bursa Fisik CPO Indonesia: Langkah Strategis Menuju Referensi Harga Global

Corresponding author:	**Received Date:** April 18, 2025
Dwivayani, IPOSS Indonesia, Indonesia	**Published Date:** May 07, 2025

Ringkasan Eksekutif

Indonesia sebagai produsen terbesar minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dunia masih menghadapi tantangan dalam menghadirkan harga acuan yang representatif dan kompetitif secara global. Peluncuran Bursa Fisik CPO Indonesia (BCPO) oleh ICDX pada Oktober 2023 diharapkan menjadi langkah awal menuju pembentukan harga referensi CPO global, namun setelah mencatat transaksi pada bulan pertama, aktivitas pasar stagnan dan tidak berlanjut. Sementara itu, harga domestik masih mengacu pada Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan CIF Rotterdam, menjadikan Indonesia tetap sebagai *price taker*. Belum optimalnya fungsi *price discovery* di BCPO mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam yang perlu untuk diurai.

Melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara kepada pelaku pasar dan *benchmarking* ke BMD, kajian ini mengidentifikasi lima akar masalah utama: tidak adanya kendali langsung atas fasilitas penyimpanan, tidak terintegrasinya bursa fisik dan berjangka, ketiadaan *broker* resmi, dualisme harga acuan, dan struktur biaya yang menghambat pelaku pasar skala kecil.

Untuk mengatasi hal tersebut, direkomendasikan reformasi internal Bursa ICDX, antara lain melalui pengelolaan sistem tangki penyimpanan, integrasi sistem perdagangan fisik dan berjangka, pengembangan jaringan broker, serta penyediaan insentif berbasis volume transaksi. Di sisi lain, peran pemerintah sangat krusial melalui harmonisasi kebijakan harga referensi lintas kementerian dan pemberian insentif fiskal untuk pelaku yang aktif bertransaksi di bursa. Implementasi rekomendasi ini diharapkan mampu membentuk sistem bursa yang aktif dan kredibel, menarik partisipasi pelaku pasar secara berkelanjutan, memperkuat kedaulatan harga CPO nasional, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat pembentukan harga CPO global.

Latar Belakang

Meskipun menjadi produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia belum mampu secara kompetitif menguasai panggung harga CPO global. Peluncuran BCPO oleh ICDX pada Oktober 2023 diharapkan menjadi langkah strategis dalam upaya tersebut. Namun, meskipun mencatat transaksi perdana sebanyak 4 lot atau setara 100 ton CPO pada sesi pertama (ICDX, 2023), namun transaksi menjadi stagnan tanpa adanya transaksi lanjutan. Padahal dalam satu tahun berdirinya BCPO, sudah lebih dari 50 pelaku industri yang telah bergabung menjadi anggota bursa. Akibatnya, pelaku industri tetap merujuk pada harga dari Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan CIF Rotterdam, yang membuat posisi Indonesia tetap sebagai price taker.

Keterbatasan BCPO dalam menjalankan fungsi price discovery akibat rendahnya partisipasi pasar (likuiditas) mencerminkan persoalan yang lebih mendalam—mulai dari keterbatasan infrastruktur fisik, absennya sistem broker, hingga kebingungan akibat keberadaan dua harga referensi domestik. Jika dicermati lebih jauh, masalah-masalah ini bukan hanya teknis, melainkan juga berkaitan erat dengan desain kelembagaan dan tata kelola pasar. Dengan mengamati dinamika yang terjadi di lapangan serta membandingkannya dengan praktik terbaik seperti yang diterapkan di bursa komoditas lainnya, khususnya BMD, muncul sejumlah pembelajaran penting tentang bagaimana sebuah bursa fisik dibangun agar dapat berfungsi sebagai alat pembentukan harga yang kredibel. Pembelajaran inilah yang menjadi dasar dalam merumuskan strategi reformasi untuk mengoptimalkan fungsi BCPO.

Mengapa BCPO Belum Berfungsi Optimal?

Sejak peluncurannya pada Oktober 2023, BCPO menghadapi sejumlah hambatan struktural yang menyebabkan stagnasi operasional. Padahal, secara kelembagaan dan regulasi, bursa ini telah memiliki kerangka kerja yang lengkap. Namun, partisipasi pasar tetap minim sehingga harga acuan domestik belum berhasil terbentuk. Temuan ini diperoleh melalui triangulasi data primer dari wawancara, telaah dokumen kebijakan, serta pembandingan dengan literatur dan praktik internasional. Lima faktor utama diidentifikasi sebagai penyebab stagnasi BCPO, yaitu:

1. **Infrastruktur Pergudangan Tidak Dikelola Langsung oleh Bursa: Ketidakpastian Mutu Produk dan Kepercayaan Pasar Menurun**

BCPO belum memiliki kendali langsung atas sistem penyimpanan dan logistik fisik produk CPO yang diperdagangkan. Meskipun titik serah telah disiapkan di 19 lokasi, pengelolaannya berada di luar otoritas ICDX. CPO dikirim langsung oleh penjual ke tangki milik pembeli di pelabuhan, menciptakan ketidakpastian dalam jual beli (terhadap kualitas dan kuantitas produk). Hal ini menjadi resiko bagi penjual dimana penjual ketika mengirimkan barang, dapat ditolak oleh pembeli dengan alasan kualitas. Begitu juga resiko bagi pembeli apabila barang yang dikirimkan tidak sesuai spesifikasi atau jumlah. Hal ini akan teratasi apabila terdapat pihak ketiga yang terpercaya yang dapat melakukan verifikasi yang dilakukan saat penyerahan barang. Terlebih apabila penyerahan dilakukan pada instalasi pihak ketiga (seperti bursa atau pihak yang ditunjuk oleh bursa) sebagaimana mana Port Tank Installations (PTIs) dikelola langsung oleh bursa Malaysia untuk menjamin mutu, transparansi, dan efisiensi transaksi.

2. Pasar Fisik dan Berjangka Terpisah: Hambatan Konvergensi Harga

Meski dikelola oleh entitas yang sama (ICDX), Bappebti membentuk BCPO dan bursa berjangka CPO menjadi dua bursa yang berjalan secara terpisah. Pemisahan ini menyulitkan tercapainya konvergensi harga antara pasar fisik dan berjangka akibat penyelesaian kontrak yang tidak saling terintegrasi. Pemisahan yang mewajibkan pelaku pasar memilih melaksanakan transaksi fisik atau non-fisik di awal menyebabkan tidak terintegrasinya harga bursa dengan harga riil. Dalam hal ini, pelaku pasar tidak dapat melakukan transaksi option dimana pihak pembeli dapat melakukan eksekusi pembelian di saat kondisi tertentu tercapai. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan di bursa mempersulit terjadinya price discovery.

Padahal, dalam praktik yang umum dilakukan oleh bursa komoditas lainnya, integrasi (keterhubungan struktural) antara kontrak berjangka dan penyelesaian fisik justru menjadi faktor kunci keberhasilan price discovery (Ahmad et al., 2018). Ketidakterkaitan ini menyebabkan fungsi bursa sebagai tempat pembentukan harga yang transparan serta sebagai mekanisme lindung nilai (hedging) tidak dapat dioptimalkan. Aktualnya harga pada pasar fisik akan memandu (meng-guide) pasar berjangka, dan fluktuasi harga di pasar berjangka akan memengaruhi (me-lead) harga pasar fisik suatu produk (Basu, 2020; Li & Zhang, 2011). Di BMD, setiap kontrak berjangka yang jatuh tempo dapat diselesaikan dengan penyerahan fisik terstandarisasi, sehingga harga berjangka tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga merefleksikan kondisi pasar riil. Kurangnya integrasi di Indonesia justru memperlebar kesenjangan antara ekspektasi pasar dan harga aktual.

3. Tanpa Broker Resmi: Membatasi Akses bagi Pelaku Kecil

Saat ini, BCPO tidak memiliki mekanisme broker resmi yang menjembatani penjual dan pembeli. Akibatnya, pelaku perdagangan bersifat terbatas, sehingga bergantung pada inisiatif pelaku skala besar, sementara pelaku skala kecil kesulitan berpartisipasi karena tidak terdapat layanan pencocokan transaksi (order-matching mechanisms) maupun konsultasi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi pasar (Pirrong, 1995). Padahal, meningkatnya jumlah pelaku pasar akan mempermudah membuat pembentukan harga menjadi lebih dinamis. Literatur lain menekankan pentingnya peran broker dalam meningkatkan interaksi dinamis antar pelaku pasar sehingga menciptakan likuiditas dan memperluas akses pasar (Hrabynska et al., 2022). Padahal, efisiensi pasar bergantung pada intermediasi aktif dan keikutsertaan pelaku spekulatif serta institusi keuangan (Jeong et al., 2023)—elemen yang belum hadir dalam sistem BCPO. Tanpa broker, bursa kehilangan fungsinya sebagai platform interaksi yang inklusif.

4. Dualisme Harga Referensi: Penetapan Harga yang Membingungkan Pasar

Terdapat dua sistem harga referensi CPO domestik: harga ICDX sebagai dasar perhitungan Harga Patokan Ekspor (HPE) oleh pemerintah, dan harga KPBN Inacom yang digunakan industri untuk penentuan harga TBS dan transaksi CPO domestik. Perbedaan pendekatan antara keduanya—ICDX berbasis bursa, KPBN berbasis lelang internal—menyebabkan selisih harga yang signifikan, di mana KPBN dianggap terlalu rendah dan ICDX terlalu tinggi. Ketidaksinkronan ini mencerminkan lemahnya regulasi terpadu sehingga menurunkan kredibilitas sistem perdagangan. Keberadaan dua harga acuan

juga menghambat efisiensi pasar karena tidak mencerminkan kondisi transaksi secara agregat. Untuk itu, harmonisasi harga acuan menjadi keharusan agar tersedia satu rujukan yang konsisten dan kredibel bagi seluruh pelaku industri.

5. Biaya Tinggi: Partisipasi Pelaku Pasar Skala Kecil Terhambat

Biaya keanggotaan dan transaksi di BCPO tergolong tinggi, terutama bagi pelaku pasar skala kecil. Tanpa skema subsidi atau insentif fiskal, partisipasi terbatas pada pelaku besar yang mampu menanggung biaya. Akibatnya, sebagian besar memilih jalur business-to-business (B2B) yang lebih murah dan fleksibel, meskipun tidak transparan dan tidak tercatat dalam sistem harga nasional. Wawancara dengan produsen menunjukkan bahwa keterbatasan perputaran dana membuat biaya tambahan akibat bertransaksi pada bursa menjadi penghambat utama. Tanpa intervensi berupa insentif, seperti potongan biaya atau subsidi transaksi, bursa akan kesulitan menarik partisipasi dan kehilangan daya saing sebagai platform perdagangan yang terbuka dan transparan.

Stagnasi BCPO bukan sekadar soal minimnya partisipasi, tetapi juga mencerminkan kebutuhan akan reformasi struktural kelembagaan. Agar BCPO dapat berfungsi optimal, penting untuk menengok praktik bursa lain yang telah sukses membangun sistem yang terintegrasi dan dipercaya pasar, seperti dari BMD di Malaysia.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Bursa Malaysia Derivatives (BMD)?

Sejak diperkenalkan pada tahun 1980, kontrak berjangka CPO BMD telah menjadi tolok ukur harga CPO global, digunakan secara luas oleh pelaku industri minyak nabati untuk memitigasi risiko dan price discovery. Keberhasilan BMD dalam membentuk harga acuan CPO internasional dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan BCPO. BMD menerapkan sistem terintegrasi kontrak berjangka dan pengelolaan fisik CPO yang dilengkapi dengan fasilitas Port Tank Installations (PTIs) yang dikelola langsung oleh bursa sehingga dapat memastikan bahwa proses penilaian dan pengawasan dilakukan secara konsisten dan transparan di seluruh jaringan penyimpanan (Coulter & Onumah, 2002; Shroff et al., 2024). Setiap kontrak berjangka dapat diselesaikan melalui penyerahan fisik yang terstandarisasi, sehingga harga mencerminkan kondisi riil pasar, bukan sekadar spekulasi. Selain itu, harga bursa ditetapkan sebagai acuan resmi untuk pungutan ekspor dan transaksi domestik, diperkuat oleh regulasi yang mendorong keterlibatan broker, spekulan, dan institusi keuangan.

Sebaliknya, BCPO masih dihadapkan pada hambatan struktural: tidak adanya kendali atas fasilitas penyimpanan, terpisahnya pasar fisik dan berjangka, serta ketiadaan harga acuan tunggal. Kurangnya integrasi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan dan membatasi partisipasi pasar. Benchmarking terhadap BMD menunjukkan bahwa keberhasilan bursa komoditas tidak hanya bergantung pada keberadaan platform perdagangan, tetapi juga pada kekuatan ekosistem yang mendukung. Stagnasi BCPO bukan hanya soal partisipasi, tetapi mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi kelembagaan berbasis pembelajaran dari praktik terbaik seperti BMD.

Rekomendasi Kebijakan Menuju Bursa yang Optimal

Mengaktifkan kembali Bursa Fisik CPO Indonesia membutuhkan pembenahan menyeluruh, baik di sisi internal ICDX maupun dari sisi kebijakan pemerintah. Tanpa kolaborasi strategis di kedua sisi, upaya menjadikan bursa sebagai acuan

harga nasional akan sulit tercapai. Karena itu, rekomendasi difokuskan pada dua langkah utama: reformasi internal ICDX sebagai pengelola bursa, dan dukungan regulasi serta fiskal dari pemerintah untuk membangun ekosistem perdagangan yang inklusif dan kompetitif.

1. Rekomendasi untuk ICDX

ICDX sebagai pengelola BCPO perlu segera mereformasi sistem internal dan mekanisme operasionalnya agar dapat menjalankan fungsi price discovery secara efektif. Langkah-langkah kunci yang direkomendasikan meliputi:

1.1. Membangun Pengelolaan Langsung Fasilitas Tangki Penyimpanan

ICDX perlu membangun dan mengelola langsung fasilitas tangki penyimpanan, atau menunjuk pihak ketiga yang independen untuk mengelola fasilitas tangki penyimpanan. Ini dapat dimulai dari pelabuhan utama seperti Belawan dan Dumai. Kendali atas infrastruktur fisik penting untuk menjamin kualitas, volume, transparansi, dan efisiensi logistik (Huda et al., 2023). Di BMD, peran PTIs telah terbukti meningkatkan kredibilitas harga dan kepercayaan pasar global.

1.2. Aktivasi Jaringan Broker Resmi

Ketiadaan broker menjadi penghambat akses bagi pelaku kecil dan menengah. ICDX dapat memberikan insentif awal—seperti diskon biaya registrasi atau komisi khusus—untuk membentuk ekosistem broker yang aktif dan kompetitif. Peran broker krusial untuk menjembatani pelaku pasar dan meningkatkan likuiditas (Mezui et al., 2013).

1.3. Integrasi Pasar Fisik dan Berjangka

Perlu penyesuaian untuk struktur pasar fisik BCPO dan kontrak berjangka CPOTR yang masih berjalan terpisah. ICDX perlu mengharmonisasi kontrak fisik dan berjangka agar pelaku pasar dapat menggunakan instrumen lindung nilai secara efektif. Tanpa integrasi, risiko yang timbul akibat perbedaan harga antara harga pasar fisik dan harga pasar berjangka (basis risk) pada suatu waktu tertentu tidak dapat ditekan, sehingga fungsi transaksi di bursa sebagai alat memitigasi risiko harga menjadi kurang efektif, akibatnya transaksi di bursa kurang menarik bagi pelaku jangka panjang (Rashid et al., 2010).

1.4. Insentif Berbasis Volume dan Edukasi Pasar

ICDX dapat menawarkan potongan biaya keanggotaan dan insentif berbasis volume transaksi untuk mendorong peralihan dari mekanisme B2B ke sistem bursa. Selain itu, komunikasi publik harus diperkuat melalui sosialisasi dan kerja sama dengan asosiasi industri. Kurangnya pemahaman pasar adalah hambatan psikologis yang tak kalah penting dari hambatan struktural. Tanpa kepercayaan pelaku, reformasi kelembagaan tidak akan efektif.

2. Langkah Lanjutan yang Memerlukan Dukungan Pemerintah

Reformasi BCPO tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada ICDX sebagai entitas privat. Dukungan regulatif dan fiskal dari pemerintah sangat krusial untuk menciptakan pasar yang kondusif. Setidaknya ada dua langkah strategis yang perlu segera diambil:

2.1. Harmonisasi Harga Acuan Nasional

Pemerintah perlu menetapkan harga ICDX sebagai acuan tunggal untuk pungutan ekspor, HPE, dan transaksi domestik. Dualisme harga antara ICDX dan KPBN menciptakan kebingungan dan melemahkan kredibilitas sistem harga nasional. Kejelasan regulatif ini akan menjadi sinyal kuat atas komitmen

pemerintah terhadap sistem harga terbuka dan transparan.

2.2. Insentif Fiskal bagi Pelaku Baru

Pelaku skala kecil—seperti koperasi petani, pedagang, dan eksportir—perlu didorong melalui insentif fiskal, seperti pembebasan pajak transaksi, subsidi biaya tangki penyimpanan, atau bantuan pembiayaan awal. Tanpa insentif, partisipasi mereka akan tetap rendah dan bursa gagal membangun sistem perdagangan yang inklusif.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan bahwa pengembangan BCPO menuntut pendekatan kolaboratif lintas aktor—pengelola bursa, regulator, dan pelaku industri. Tanpa koordinasi yang solid, BCPO sebagai alat pembentuk harga berisiko menjadi sekadar wacana, bukan alat pembentuk harga nasional dan global yang nyata.

3. Dukungan dari Pelaku Industri

Para pelaku industri diharapkan dapat berperan positif dalam rangka memastikan pembentukan harga yang wajar, sehingga harga yang wajar tersebut dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan termasuk kebijakan yang akan mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan

Jika rekomendasi ini dijalankan secara bertahap dan konsisten, transaksi di BCPO diharapkan akan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah dan ragam partisipasi pelaku pasar. Infrastruktur pergudangan (tangki penyimpanan) yang dikelola langsung oleh bursa, aktivasi jaringan broker, serta insentif berbasis volume akan akan menarik pelaku usaha untuk berpindah dari skema konvensional ke makanisme bursa.

Selain memperluas basis partisipasi, reformasi ini juga menciptakan transparansi dan efisiensi pembentukan harga domestik. Ketidakpastian harga akibat keterbatasan informasi pasar dan dominasi beberapa pelaku besar dalam skema lelang tertutup dapat diminimalisir. Integrasi antara pasar fisik dan berjangka, serta penggunaan satu harga yang lebih mencerminkan harga yang sebenarnya (harga ICDX jika transaksinya sudah memadai) sebagai acuan tunggal akan mengurangi praktik manipulasi dan meningkatkan kepastian usaha, khususnya bagi pelaku kecil yang selama ini tidak memiliki posisi tawar. Sebuah sistem harga yang transparan tidak hanya menguntungkan produsen, tetapi juga memperkuat posisi konsumen industri hilir karena mereka mendapatkan kepastian biaya bahan baku yang lebih stabil dan dapat diprediksi (Setiahutami & Chalid, 2024). Harga yang terbentuk akan merefleksikan transaksi riil dan dapat ditelusuri asal-usulnya.

Dalam jangka panjang, reformasi BCPO akan menurunkan ketergantungan Indonesia terhadap harga referensi luar negeri dan Indonesia dapat mengukuhkan perannya sebagai pusat harga global CPO. Keberhasilan ini juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi dagang dan regulasi keberlanjutan.

Dengan demikian, reformasi BCPO bukan hanya kebijakan teknis, melainkan sebuah strategi geopolitik untuk mengembalikan kedaulatan harga yang semestinya kepada negara produsen CPO terbesar.

Penutup

ICDX memiliki posisi strategis untuk memimpin pembentukan harga referensi CPO nasional. Namun, peran ini belum sepenuhnya terwujud karena kelemahan struktural—mulai dari minimnya infrastruktur pergudangan, perbedaan

penggunaan harga acuan dalam negeri, hingga absennya insentif bagi pelaku pasar. Rekomendasi yang diajukan menekankan pentingnya reformasi menyeluruh melalui kolaborasi antara ICDX, pemerintah, dan pelaku industri. Momentum stagnasi BCPO justru dapat dimanfaatkan sebagai titik tolak untuk membangun sistem perdagangan komoditas yang lebih inklusif dan berdaulat. Keberhasilan BMD menjadi tolok ukur penting bahwa sistem bursa yang terintegrasi dan didukung kebijakan konsisten mampu membentuk harga yang kredibel dan diakui global. Dengan terbentuknya bursa fisik CPO yang aktif dan terpercaya, Indonesia tidak lagi akan menjadi sekadar pengikut harga global, tetapi penentu utama dalam arsitektur pasar CPO dunia. Oleh karena itu, reformasi BCPO menjadi sebuah kebutuhan strategis yang tidak lagi opsional.

Daftar Pustaka

Ahmad, N., Zainudin, A. D., Rahim, F. A., & Ho, C. S. F. (2018). Effective Cross Hedging: Evidence from Physical Crude Palm Oil and Its Inter-Related Agricultural Futures Contracts. Management and Accounting Review, 17(2), 123–134. https://doi.org/10.24191/mar.v17i2.812

Basu, S. (2020). Spot and futures markets – Scope for integration. IIMB Management Review, 32(3), 336–345. https://doi.org/10.1016/j.iimb.2020.10.001

Coulter, J., & Onumah, G. (2002). The role of warehouse receipt systems in enhanced commodity marketing a rural livelihoods in Africa. Food Policy, 27(4), 319–337. https://doi.org/10.1016/S0306-9192(02)00018-0

Hrabynska, I., Kosarchyn, M., & Dąbrowska, A. (2022). Economic Imperatives of Financialization of Agricultural Commodity Market. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 8(3).

Huda, Nazmul, M., & Mohammad Athar, S. (2023). Effect of Commodity Exchange on the Economy-Prospects and Challenges. Munich Personal RePEc Archive (MPRA), 118331.

ICDX. (2023). Perdagangan Perdana Kontrak Fisik CPO Melalui Bursa ICDX. https://www.icdx.co.id/news-detail/corporate-news/perdagangan-perdana-kontrak-fisik-cpo-melalui-bursa-icdx

Jeong, M., Kim, S., Yi, E., & Ahn, K. (2023). Market efficiency and information flow between the crude palm oil and crude oil futures markets. Energy Strategy Reviews, 45(October 2022), 101008. https://doi.org/10.1016/j.esr.2022.101008

Li, L.-H., & Zhang, Q. (2011). An empirical study on spot and futures market price of soybean, soybean oil and soybean meal in China. IEEE 18th International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, Part 2, 1197–1201. https://doi.org/10.1109/IEEM.2011.6035371

Mezui, C. A. M., Rutten, L., Sekioua, S., Zhang, J., N'Diaye, M. M., Arvanitis, Y., Duru, U., & Nekati, B. (2013). Guidebook on African Commodity and Derivatives Exchanges. 92.

Pirrong, S. C. (1995). The Self-Regulation of Commodity Exchanges: The Case of Market Manipulation. The Journal of Law and Economics, 38.

Rashid, S., Winter-nelson, A., & Garcia, P. (2010). Purpose and potential for commodity exchanges in African economies. International Food Policy Research Institute, November, 1–32.

Setiahutami, S. A., & Chalid, D. A. (2024). Volatility spillovers of Crude Palm Oil, Crude Oil, Coal, Exchange Rates and Indonesian Stock Market 2013-2023. Eduvest - Journal of Universal Studies, 4(5), 3847–3869. https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1119

Shroff, S., Shah, D., & Kundurthi, R. (2024). Volatility in Edible Oil Economy - Issues for Self-sufficiency. Economic and Political Weekly, 59(6), 53–60.

Disclaimer:

Policy Brief ini disusun oleh Tim Riset IPOSS untuk memberikan informasi dan wawasan mengenai perkembangan riset yang dilakukan tentang bagaimana mengaktifkan kembali Bursa Fisik CPO Indonesia. Temuan dan kesimpulan dalam laporan ini bersumber pada data publik yang dapat diakses saat publikasi. Meskipun telah dilakukan upaya maksimal untuk menjamin akurasi dalam penyajian data dan analisis, IPOSS tidak bertanggung jawab atas kekeliruan, kelalaian, atau dampak yang timbul dengan penggunaan informasi di dalamnya. Pembaca diharapkan menggunakan kebijaksanaan sendiri dalam menafsirkan dan memanfaatkan isi laporan ini.

Untuk korespondensi lebih lanjut dapat menghubungi :
Sdr. Dimas H. Pamungkas di nomor WA: 085270127659 atau email: dimas.pamungkas@iposs.co.id

IPOSS

INDONESIA PALM OIL STRATEGIC STUDIES

Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS)
Sahid Sudirman Center, Lantai 16.A
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220

www.iposs.co.id